

# PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE LUWUK TIMUR KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## *THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE MANAGEMENT OF THE EAST LUWUK MANGROVE FOREST, BANGGAI REGENCY, CENTRAL SULAWESI PROVINCE*

Oleh

**Ummu Kalsum<sup>\*1)</sup>, Ris Hadi Purwanto<sup>2)</sup>, Lies Rahayu Wijayanti Faidah<sup>3)</sup>, Sumardi<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4)</sup>Department of Forestry, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University. Jl. Agro 1, Bulaksumur  
Yogyakarta 55281

Email: [ummujurnal16@gmail.com](mailto:ummujurnal16@gmail.com)

Diterima: 25 Januari 2022

Disetujui: 28 April 2022

### **Abstrak**

Hutan mangrove di Luwuk Timur telah mengalami kerusakan. Akibatnya terjadi pengurangan luasan. Para pihak yang terkait dalam menjalankan perannya belum optimal sehingga kondisi mangrove tetap terdegradasi. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan, menganalisis peran *stakeholders* dan menguraikan hubungan antar *stakeholders* terhadap pengelolaan hutan mangrove. Penelitian dilaksanakan di hutan mangrove Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan *Key Player* belum membuat rencana terpadu pengelolaan hutan mangrove mengakibatkan kurang bersinerginya kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengelola. Agar mangrove lestari perlu adanya peningkatan peran dari masyarakat yang semula hanya menjadi *Subject* agar menjadi *Key Player* melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Perguruan Tinggi perlu meningkatkan perannya dari *Crowd* menjadi *Context Setter* yang berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan. Perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove. Kegiatan pemberdayaan perlu dilaksanakan secara intensif untuk mendorong terjadinya perubahan peran dalam pengelolaan mangrove.

**Kata kunci :** *Hutan Mangrove, Stakeholders, Luwuk Timur*

### **Abstract**

The mangrove forest in East Luwuk has been damaged, resulting in a reduction in area. The parties involved in ensuring that you are not optimal so that the condition of the mangrove remains degraded. This research was conducted to identify the stakeholders involved in the management, analyze the role of stakeholders and describe the relationship between stakeholders in mangrove forest management. The research was conducted in the East Luwuk mangrove forest, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. The results showed that the Key Players had not made a mangrove forest management plan which resulted in a lack of synergy in the activities carried out by the managers. In order for mangroves to be sustainable, it is necessary to increase the role of the community which was originally only a subject to become a key player through community empowerment activities. Provincial and District Governments as well as Universities need to improve from Crowd to Context Setters who have a big influence in policy making. It is necessary to form a Coordination Team for Mangrove Forest Management Strategy at the provincial and district levels to synergize policies and programs for managing mangrove ecosystems. Empowerment activities need to be carried out intensively to encourage a change in the role of mangrove management.

**Keyword :** *Mangrove Forest, Stakeholder, East Luwuk*

## PENDAHULUAN

Mangrove adalah salah satu ekosistem pesisir yang paling terpengaruh oleh manusia, terlepas dari social dan peran ekologis, dan setelah beberapa decade kehancuran hutan ini terus menghadapi proses yang berbeda dari konversi, mengancam masa depan mangrove secara global, meskipun ada perlindungan undang-undang yang ketat (Ferreira & Lacerda, 2016). Pemahaman ilmiah tentang luas dan sebaran hutan mangrove di dunia belum memadai. Basis data mangrove global yang tersedia yang disusun dengan menggunakan sumber data geospasial dan statistic nasional yang berbeda perlu ditingkatkan (Giri et al., 2010).

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang menantang untuk dilakukan inventarisasi (Otero et al., 2018). Mangrove telah dieksploitasi secara sistematis di Indonesia sejak tahun 1800, terutama untuk pengembangan budidaya udang air payau (tambak) dan untuk pengambilan kayu. Pada akhir tahun 1960-an Indonesia diperkirakan telah kehilangan lebih dari 200.000 ha hutan bakau yang sebagian besar berada di Jawa dan Sumatera (Ilman et al., 2016). Hilangnya habitat mangrove lebih dari 50% telah tercatat di beberapa bagian dunia dan kerugian ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia (Romañach et al., 2018).

Luas wilayah mangrove di Kabupaten Banggai adalah 7,387 Ha dan 5,652 Ha diantaranya rusak berat. Luas mangrove di Kecamatan Luwuk Timur yakni seluas 350 Ha

dan 209 Ha diantaranya rusak berat (Abubakar, 2017). Kondisi Keanekaragaman yang cukup tinggi di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi penurunan keanekaragaman jenis, baik secara langsung oleh aktivitas manusia ataupun oleh kejadian alami mengingat peranan ekologi mangrove dalam mendukung wilayah pesisir dan laut. Pengetahuan masyarakat mengenai keanekaragaman jenis masih kurang, sehingga perlu upaya sosialisasi mengenai keanekaragaman jenis mangrove serta potensinya di wilayah ini (Irawan, 2005).

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang sangat produktif (Ely et al., 2021) dan memiliki banyak manfaat yang menyebabkan berbagai kepentingan dari para aktor terhadap hutan mangrove (Mustika et al., 2017). Manfaat berbagai produk dan jasa dari hutan mangrove telah dirasakan oleh manusia (Arfan, 2021). Untuk meningkatkan manfaat sekaligus melestarikan ekosistem mangrove yang masih tersisa perlu upaya nyata serta koordinasi yang harmonis antar pihak yang terkait (Suharti, 2016). Peran stakeholders sangat penting dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove, mengingat stakeholders sebagai pelaku pembangunan dan pengguna sumberdaya alam (Joandani et al., 2019).

Permasalahan yang terjadi saat ini menjadi indikator untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, apakah kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove Luwuk Timur karena kurangnya peran *stakeholders* dalam pengelolaan atau ada faktor lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholders*

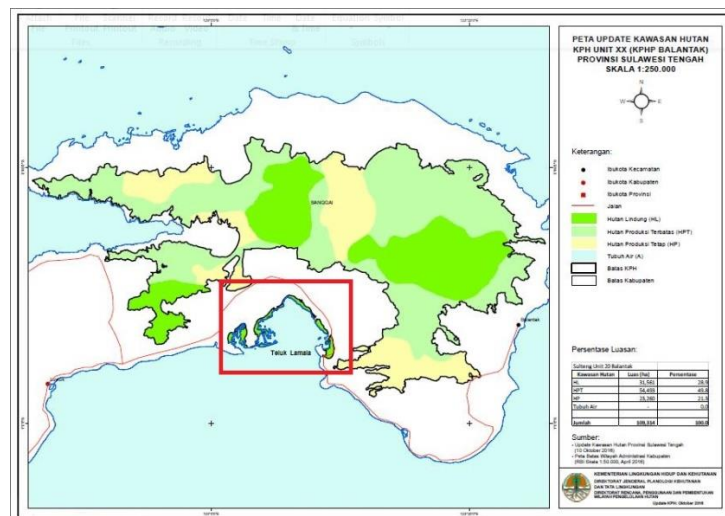
yang terlibat dalam pengelolaan, menganalisis peran *stakeholders* dan menguraikan hubungan antar *stakeholders* terhadap pengelolaan hutan

mangrove Luwuk Timur, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hutan mangrove Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian

ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2019. Gambar 1 menunjukkan peta lokasi penelitian.



**Gambar 1.** Peta lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif dalam memperjelas analisis kualitatif. Pengumpulan data mengenai pengelolaan hutan mangrove di Luwuk Timur dilaksanakan dengan teknik *purposive sampling*, di mana

penggalan data diarahkan untuk tujuan tertentu kepada pihak/orang yang mengetahui dan memahami situasi dan kondisi pengelolaan hutan mangrove di Luwuk Timur kepada informan kunci

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Identifikasi Stakeholders**

Pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan kebijakan otonomi daerah juga berlaku untuk pengelolaan hutan mangrove (Ikhsanudin et al., 2018). Hutan mangrove memiliki

karakteristik sumber daya milik bersama cenderung rusak karena hak-haknya sulit untuk ditegakkan. Para pihak yang terkait dalam menjalankan perannya harus optimal agar kondisi mangrove tidak terus terdegradasi (Ambinari et al., 2016). Peningkatan kemampuan dan peningkatan kesadaran

terhadap hutan mangrove sebagai salah satu system penyangga kehidupan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk melibatkan *stakeholders* dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove (Muzani, 2014).

*Stakeholders* pihak yang bersinggungan langsung dengan isu dan permasalahan yang sedang terjadi atau berkembang di dalam masyarakat (Kholek et al., 2021). *Stakeholders* juga dapat membantu dalam memobilisasi

sumberdaya lokal (Rastogi et al., 2010). Seluruh pemangku kepentingan harus mempunyai tujuan pengelolaan yang sama (Sukristiyono et al., 2021). Hasil identifikasi *stakeholders* menunjukkan bahwa *stakeholders* berasal dari unsur instansi pemerintahan (government), masyarakat (*community*), dan swasta (business). Jumlah *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Luwuk Timur ada 16 *stakeholders*.

**Tabel 1.** Hasil Identifikasi *Stakeholders*

No.	Klasifikasi	Instansi/ <i>Stakeholders</i>
1.	Pemerintah Pusat	BPDASHL Palu-Poso dan BPKH Wilayah XVI Palu
2.	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulteng, Dinas Kehutanan Prov. Sulteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, Bappeda Sulteng, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai, Biro Sumber Daya Alam Kab. Banggai, KPH Balantak dan Camat Luwuk Timur
3.	Masyarakat	Kepala Desa/Tokoh Masyarakat 4 Desa
4.	Perguruan Tinggi	Universitas Tadulako
5.	Swasta	PT. Lautan Gunung Mas

Sumber: Data Primer 2021

*Stakeholders* dari unsur pemerintah yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Luwuk Timur memiliki peran yang tidak sama satu sama lain. *Stakeholder* dari unsur pemerintah pusat yakni Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL Palu-Poso) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH Wilayah XVI Palu). BPDASHL Palu-Poso menjadi *stakeholder* penting karena berwenang sebagai pengelola hutan mangrove

Luwuk Timur. Bentuk peran-peran tersebut meliputi perlindungan sumberdaya dan rehabilitasi hutan mangrove. *Stakeholder* dari unsur pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten sebagai instansi teknis terkait, memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat setempat dan penyedia data informasi hutan mangrove di Luwuk Timur.

*Stakeholder* dari unsur masyarakat terdiri dalam kelompok masyarakat dan perorangan

yang berada di masing-masing desa kajian. Masyarakat dalam hal ini adalah kepala desa dan tokoh masyarakat/tokoh adat yang memiliki kepentingan dalam keterlibatan kegiatan pembibitan tanaman mangrove dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. *Stakeholder* dari unsur perguruan tinggi yaitu Universitas Tadulako (Untad). Untad merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu. Untad mempunyai peran dalam melaksanakan pendidikan lingkungan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah hutan mangrove Luwuk

Timur. *Stakeholder* dari unsur swasta yaitu perusahaan tambak udang yang dimiliki oleh PT. Lautan Gunung Mas. *Stakeholder* dari swasta memiliki peran dalam penyedia kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

### Klasifikasi *Stakeholders*

Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria kepentingan dan kriteria pengaruh.

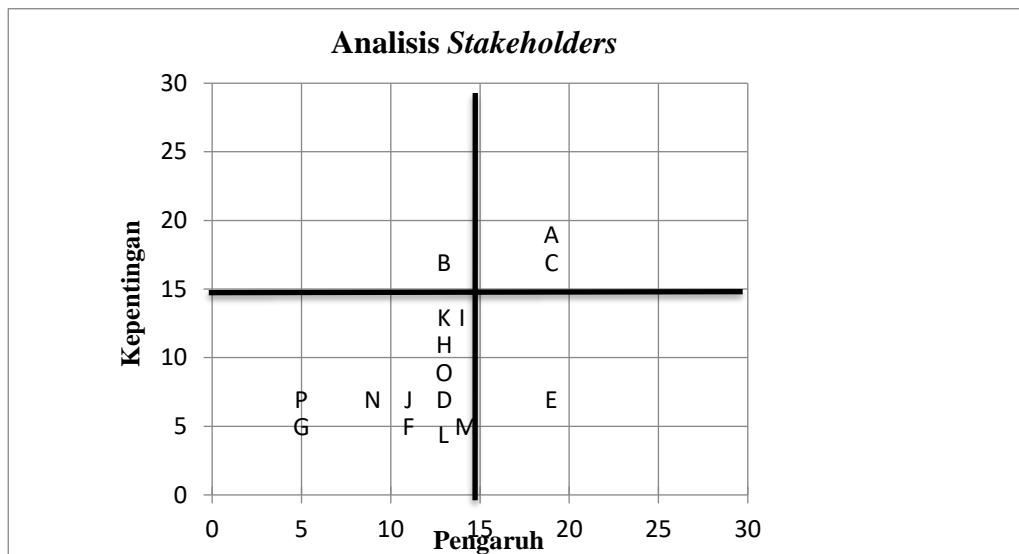
**Tabel 2.** Klasifikasi *Stakeholders*

<i>Subjects</i>	<i>Key players</i>
B. Dinas LH Prov. Sulteng	A. KPH Balantak C. BPDASHL Palu-Posos
<i>Crowd</i>	<i>Context setter</i>
D. Dinas Kehutanan Prov. Sulteng F. Bappeda Sulteng G. BPKH Wilayah XVI Palu H. Dinas LH Kab. Banggai I. Biro SDA Kab. Banggai J. Universitas Tadulako K. Camat Luwuk Timur L. Desa Kayutanyo M. Desa Hunduhon N. Desa Bantayan O. Desa Uwedikan P. PT. Lautan Gunung Mas	E. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng

*Sumber: Data Primer 2021*

Selanjutnya klasifikasi *stakeholders* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholders* dapat dilihat pada matriks kepentingan dan pengaruh menggunakan *stakeholder grid*. Kategori pada

matriks (Gambar 1) dapat menggambarkan posisi dan peranan yang dimainkan masing-masing *stakeholders* dalam pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur, yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2.** Analisis Stakeholders

*a. Subject*

*Stakeholders* yang masuk dalam kategori I (Subjects) merupakan pihak dengan kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. *Stakeholders* yang termasuk dalam klasifikasi *Subject* yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, *stakeholders* tersebut memiliki nilai penting yang tinggi terhadap keberhasilan hutan mangrove Luwuk Timur, namun memiliki pengaruh yang rendah terhadap pengelolaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah penting tetapi memerlukan pelibatan agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove. Pelibatan *stakeholders* tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan mengikutsertakannya di setiap tahapan pengelolaan.

*b. Key player*

*Key Player* yaitu *stakeholders* yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi. *Stakeholders* yang berada pada *Key Players* ini merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan suatu pengelolaan. BPDASHL Palu-Poso memiliki peran yang penting dalam pengembangan hutan mangrove. BPDASHL Palu-Poso mempunyai nilai kepentingan dan pengaruh yang tinggi karena sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT-KLHK) di lapangan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. Hal ini ditemui di setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, dimana pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama (Muji et al., 2018). KPH Balantak mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap kawasan hutan mangrove Luwuk Timur. KPH Balantak

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah) yang diberikan mandat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi.

*c. Context setter*

*Context Setter* merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi kepentingannya rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai pengaruh tinggi yang dapat mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. Hal ini dikarenakan mereka adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki wewenang yang besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya. (Ambinari et al., 2016) *Context Setter* berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan terhadap keberlanjutan hutan mangrove.

*d. Crowd*

**Hubungan antar Stakeholders dalam pengelolaan**

Untuk menciptakan pengelolaan yang kolaboratif, harus dilakukan analisis *stakeholders* dan pengelolaan (Edo Herlangga & Basuni, 2019). Deskripsi dari hubungan antar *stakeholders* menunjukkan alur hubungan antar *stakeholders* baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan. Dengan terjalinnya hubungan antar *stakeholders* dimaksudkan untuk membentuk

*Crowd* merupakan *stakeholders* dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholders* ini membutuhkan sedikit pengawasan dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Bappeda Sulawesi Tengah berperan di bidang pemberdayaan dan kegiatan ekonomi, belum banyak berkontribusi terhadap pengelolaan hutan mangrove. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dan Biro Sumber Daya Alam Kabupaten Banggai juga belum mampu berperan banyak. Kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan mangrove merupakan kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal penanaman bibit mangrove dalam jumlah kecil. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa Universitas Tadulako, Camat Luwuk Timur, Desa Kayutanyo, Desa Hunduhon, Desa Bantayan, Desa Uwedikan dan PT. Lautan Gunung Mas juga memberikan perhatian, namun tidak terlibat secara langsung dengan pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur.

suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang konsep pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur.

Hubungan antar *stakeholders* dalam pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur teridentifikasi dalam 3 hubungan yaitu hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Komunikasi merupakan bentuk hubungan yang penting dijalin oleh para *stakeholders*. Adanya komunikasi memberikan informasi kepada *stakeholders* yang terlibat

dalam menyampaikan tingkat kepentingan *stakeholders* yang dapat mendukung program pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. Koordinasi merupakan hubungan antar *stakeholders* yang paling banyak ditemukan di lapangan. Bentuk koordinasi yang dilakukan pada pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur merupakan bentuk teknis dari pelaksanaan program. Sedangkan bentuk kerjasama merupakan bentuk hubungan yang dilakukan oleh *stakeholders* yang dilandasi oleh hak dan kewajiban (kontribusi) antar pihak berupa dukungan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur.

#### a. Kerjasama

Kerjasama (*cooperation*) adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Muji et.al, 2018). Proses terjadinya *cooperation* apabila di antara individu atau kelompok tertentu menyadari adanya kepentingan dan ancaman yang sama. Kerjasama antar *stakeholders* terkait pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur sebagian besar merupakan hubungan kerjasama atas dasar tupoksi, aturan kelembagaan, serta kesamaan visi dan misi suatu lembaga, instansi dan kelompok masyarakat. Kerjasama antara BPDASHL Palu-Poso selaku pengelola Hutan mangrove Luwuk Timur dengan Pemda Kabupaten Banggai yang melibatkan masyarakat banyak dilakukan. Untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kondisi hutan mangrove bekerjasama dengan KPH Balantak dalam bentuk sinergitas program kerja tahunan. Kemudian untuk pelaksanaan

rehabilitasi dan penanaman bibit mangrove, BPDASHL Palu-Poso juga menjalin kerjasama dengan KPH Balantak dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.

Untuk mensinkronkan pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur dengan tata ruang pembangunan Kabupaten Banggai maka Bappeda, Untad, BPDASHL Palu-Poso, DKP, DLH dan Biro SDA kerjasama dalam forum-forum kajian seperti penetapan kawasan dan survey lapangan serta penentuan kebijakan dalam pengelolaan.

#### b. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna (Muji et.al, 2018). Dalam komunikasi terkait dengan pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur ada tiga unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi yaitu sumber informasi, media dan penerima informasi.

Hubungan komunikasi antara *stakeholders* terjadi pada hampir seluruh kegiatan pengelolaan. Mulai dari inventarisasi dan identifikasi di kawasan hutan mangrove, kegiatan pemantauan dan monitoring, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program rehabilitasi. Untuk perlindungan dan pengamanan hutan mangrove Luwuk Timur, BPDASHL Palu-Poso menjalin komunikasi dengan KPH Balantak dan masyarakat sekitar hutan mangrove Luwuk Timur dalam mensosialisasikan zonasi dan rencana pengelolaan, konservasi



keanekaragaman hayati dan ekosistem, bahaya kebakaran hutan, dan sosialisasi aturan dan sanksi.

BPDASHL Palu-Poso juga menjalin komunikasi dengan KPH Balantak dalam program kegiatan rehabilitasi. Hubungan komunikasi antar instansi juga dilakukan DLH, Biro SDA, Camat dan seluruh Desa yang berbatasan langsung dengan hutan mangrove Luwuk Timur yaitu Desa Kayutanyo, Desa Hunduhon, Desa Bantayan dan Desa Uwedikan dalam pelaporan terkait kegiatan-kegiatan pelestarian hutan mangrove. Untuk kepentingan penelitian, BPDASHL Palu-Poso dan KPH Balantak selaku pengelola hutan mangrove Luwuk Timur, menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang aktif melakukan penelitian seperti Universitas Tadulako.

### c. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Hubungan koordinasi antar *stakeholders* banyak ditemukan di lapangan. Bentuk koordinasi yang dilakukan merupakan bentuk teknis dari pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. BPDASHL Palu-Poso dan KPH Balantak sebagai pengelola hutan mangrove Luwuk Timur harus berkoordinasi

dengan instansi yang ada di pemerintahan daerah untuk sinkronisasi visi misi Kabupaten Banggai. Diantaranya adalah Bappeda (perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah), Dinas Kehutanan dan Biro SDA (hasil hutan non kayu), DLH dan DKP (perlindungan lingkungan, wilayah pesisir dan laut).

BPDASHL Palu-Poso dan KPH Balantak juga berkoordinasi dengan Camat, Desa Kayutanyo, Desa Hunduhon, Desa Bantayan, Desa Uwedikan dan masyarakat untuk menjaga kawasan hutan mangrove Luwuk Timur. Koordinasi juga dilakukan dengan PT. Lautan Gunung Mas agar memperhatikan limbah pembuangan agar tidak merusak ekosistem yang ada. Koordinasi yang dilakukan dengan BPKH wilayah XVI Palu dalam rangka memperoleh data lapangan sebagai dasar untuk pemutakhiran data. Untuk menyatukan persepsi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur dibutuhkan koordinasi yang baik antar *stakeholders*. Heri S *et.al* (2015), menyatakan, agar kegiatan bisa berjalan efektif dilakukan koordinasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. (Farahisah *et al.*, 2021), juga menyatakan bahwa idealnya seluruh *stakeholders* hendaknya mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi (termasuk dalam *key players*).

dan *stakeholders* utama. Sedangkan *stakeholders* pendukung seperti pemerintah provinsi dan kabupaten, akademisi, swasta dan masyarakat belum memberikan kontribusi

## KESIMPULAN

Hasil identifikasi stakeholder menunjukkan bahwa *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan hanya *stakeholders* kunci

terhadap pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. Hasil analisis dengan belum optimalnya peran *stakeholders* dalam pengelolaan mengakibatkan belum adanya pembagian peran

dan tanggungjawab dalam mengoptimalkan pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur, sehingga pengelolaan hutan mangrove belum optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S. K. (2017). Survei Mangrove Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. In *Project Development of Coastal and Marine Profile of Banggai District*. PKEPKL UNG dan Perkumpulan JAPESDA Gorontalo.
- Ambinari, M., Darusman, D., Alikodra, H. S., & Santoso, N. (2016). Penataan Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Perkotaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.20886/jakk.2016.13.1.29-40>.
- Arfan, et. a. (2021). Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Sebagai Kawasan Hutan Produksi Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Indonesia. *Jurnal Environmental Science*, 3(2), 8–17.
- Edo Herlangga, R., & Basuni, S. (2019). Stakeholder management of Kawasan konservasi mangrove dan bekantan in Tarakan city. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 23(5), 146–153. <https://doi.org/10.7226/jtjm.25.3.146>.
- Ely, A. J., Tuhumena, L., Sopaheluwakan, J., & Pattinaja, Y. (2021). Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Di Negeri Amahai. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(1), 57–67. <https://doi.org/10.30598/tritonvol17issue1page57-67>.
- Farahisah, H., Yulianda, F., & Effendi, H. (2021). Pengelolaan ekosistem mangrove di muara Sungai Musi sebagai upaya mitigasi emisi karbon. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 4(3), 565–575. <https://doi.org/10.36813/jplb.4.3.565-575>.
- Ferreira, A. C., & Lacerda, L. D. (2016). Degradation and conservation of Brazilian mangroves, status and perspectives. *Ocean and Coastal Management*, 125, 38–46. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.03.011>.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., & Duke, N. (2010). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154–159. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x>.
- Heri Santoso., E.K.S Harini M., Hariadi K., & Rinekso S. (2015). Peranan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 12 No. 3 Desember 2015, Hal. 197–211
- Ikhsanudin, N., Kusmana, C., & Basuni, S. (2018). Analisis Pemanfaatan Hutan Mangrove Dan Peran Stakeholders di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Agrica*, 11(2), 47–58. <https://doi.org/10.31289/agrica.v11i2.1753.g1657>.
- Ilman, M., Dargusch, P., Dart, P., & Onrizal. (2016). A historical analysis of the drivers of loss and degradation of Indonesia's mangroves. *Land Use Policy*, 54, 448–459. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.010>.

- Irawan, B. (2005). KONDISI VEGETASI MANGROVE DI LUWUK-BANGGAI SULAWESI TENGAH Budi Irawan Jurusan Biologi FMIPA UNPAD. *Vegetasi Flora*, 1, 6–7.
- Joandani, G. K. J., Pribadi, R., & Suryono, C. A. (2019). Kajian Potensi Pengembangan Ekowisata Sebagai Upaya Konservasi Mangrove Di Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang. *Journal of Marine Research*, 8(1), 117–126. <https://doi.org/10.14710/jmr.v8i1.24337>.
- Kholek, A., Izzudin, M., Sriwijaya, U., & Sriwijaya, U. (2021). Pemetaan Kekuatan Dan Kepentingan Sakeholder Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Pulau Baai Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 129–152.
- Muji L.W., Rinekso S., Hadi S.A. (2018). Analisis *Stakeholders* Dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 8 No.1 (April 2018): 55-61
- Mustika, I. Y., Kustanti, A., & Hilmanto, R. (2017). Kepentingan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(2), 113. <https://doi.org/10.23960/jsl25113-127>.
- Muzani, M. (2014). Strategi Peningkatan Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Tangerang. In *SPATIAL: Jurnal Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi* (Vol. 12, Issue 2, pp.21–27). <https://doi.org/10.21009/spatial.122.04>.
- Otero, V., Van De Kerchove, R., Satyanarayana, B., Martínez-Espinosa, C., Fisol, M. A. Bin, Ibrahim, M. R. Bin, Sulong, I., Mohd-Lokman, H., Lucas, R., & Dahdouh-Guebas, F. (2018). Managing mangrove forests from the sky: Forest inventory using field data and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) imagery in the Matang Mangrove Forest Reserve, peninsular Malaysia. *Forest Ecology and Management*, 411(December 2017), 35–45. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.12.049>.
- Rastogi, A., Badola, R., Hussain, S. A., & Hickey, G. M. (2010). Assessing the utility of stakeholder analysis to Protected Areas management: The case of Corbett National Park, India. *Biological Conservation*, 143(12), 2956–2964. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.04.039>.
- Romañach, S. S., DeAngelis, D. L., Koh, H. L., Li, Y., Teh, S. Y., Raja Barizan, R. S., & Zhai, L. (2018). Conservation and restoration of mangroves: Global status, perspectives, and prognosis. *Ocean and Coastal Management*, 154(February 2017), 72–82. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.01.009>.
- Suharti, S. (2016). Analisis Berbagai Peran Para Pihak dalam Kemitraan Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 13(2), 73–84. <https://doi.org/10.20886/jphka.2016.13.2.73-84>.
- Sukristiyono, S., Purwanto, R. H., Suryatmojo, H., & Sumardi, S. (2021). Stakeholder Analysis on Sungai Wain Protected Forest Management in Balikpapan City, East Kalimantan Province. *Jurnal Sylva Lestari*, 9(2), 252. <https://doi.org/10.23960/jsl29252-268>